

STRATEGI DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN KOTA SAMARINDA

**Suksio Rhozan Imana Maksu¹, Farhanuddin Jamanie², Anwar
Alaydrus³**

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh dinas ketahanan pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan Kota Samarinda sebagai ukuran pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yakni melalui kebijakan pangan yang bertujuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat hidup dengan layak yang dilihat dari strategi-strategi yang dilakukan oleh dinas ketahanan pangan kota samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan startegi-strategi dinas ketahanan pangan belum sepenuhnya efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan dilapangan seperti kurangnya koordinasi dan adanya aturan yang menghambat cadangan pangan serta kendala seperti kurangnya aparatur dalam melakukan pengecekan atau pengawasan di lapangan agar data yang diterima dari pusat dengan yang di lapangan sesuai. Dan juga untuk pasokan untuk cadangan pangan beras di Kota Samarinda sangatlah mencukupi untuk masyarakat karena Dinas ketahanan Pangan mempunyai kerjasama dengan daerah produsen untuk meningkatkan cadangan pangan agar tidak terjadinya kerawanan pangan di Kota Samarinda dengan cara mengadakan terobosan seperti bazar pangan murah dan juga berkerjasama dengan BULOG dalam hal penyediaan dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah.

Kata Kunci: *strategi, ketahanan pangan, cadangan pangan.*

Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil,

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: suksiorhozan@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri, sehingga menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat untuk mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mempermudah atau menungkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi, sehingga dapat meningkatkan nilai tambahan dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan Nasional.

Pentingnya beras dalam hal kebutuhan pangan yaitu beras sebagai komoditas basis strategis. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangannya dari produksi dalam negeri. Sasaran indikatif produksi komoditas utama tanaman pangan dan cadangan pangan pemerintah berbasis pada beras. Namun demikian, dengan semakin berkurangnya areal garapan per-petani, keterbatasan pasokan air irigasi dan mahalnya harga input serta relatif rendahnya harga produk dapat menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala untuk program peningkatan kesejahteraan dan kemandirian petani yang berbasis sumberdaya lokal tersebut. Selain itu penduduk yang semakin membesar, dengan sebaran populasi yang menyebar dan cakupan geografis yang luas. Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau serta memenuhi kriteria kecukupan konsumsi maupun persyaratan operasional logistik, oleh karena itu program pengelolaan distribusi dan pasar pangan khususnya beras sangatlah diperlukan.

Dengan presentase ketersediaan produksi beras terhadap kebutuhan beras Kota Samarinda dalam 4 (empat) tahun terakhir persentase ketersediaan beras pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,70% dengan persentase devisit kekurangan besar sebesar -88,30% dan mengalami penurunan persentase penyediaan pada tahun 2016 hanya sebesar 9,97% dengan peningkatan persentase devisit sebesar 1,73% menjadi -90,03% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan persentase penyediaan sebesar 17,38% dengan penurunan persentase devisit sebesar 7,41% menjadi -82,62% dan juga pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan persentase ketersediaan beras sebesar 19,23% dengan penurunan devisit persentase kebutuhan beras sebesar 1,86% menjadi -80,76% dengan kata lain bahwa produksi beras di Kota Samarinda belum mencukupi untuk kebutuhan beras masyarakat Kota Samarinda setiap tahunnya.

Dengan keadaan lahan persawahan yang sedikit tetapi kota Samarinda masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya dan hingga saat ini masyarakat kota

Samarinda masih bisa menikmati makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras, disamping komoditi beras yang menurun produksinya, komoditi-komoditi lainnya seperti jagung dan sayur mayur mengalami peningkatan produksi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kota Samarinda harus menerima suplai dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Dengan kondisi jumlah penduduk sekitar 778.883 jiwa dan luas lahan pertanian hanya seluas 6.010 hektare, ketahanan pangan di Samarinda masih tetap stabil oleh karena itu, tidak lepas dari peran pemerintah dalam menstabilkan ketahanan pangan maka dari itu perlu untuk dikaji lebih mendalam. Dibalik lahan pertanian yang sangat sempit serta jumlah petani yang setiap tahunnya semakin menurun, hal ini bisa terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat Samarinda beranggapan bahwa profesi sebagai petani itu tidaklah menguntungkan dan identik dengan kemiskinan dan juga peralihan fungsi lahan yang awalnya sebagai lahan pertanian dan beralih fungsi menjadi lahan pertambangan yang tentunya menyulitkan sebagian masyarakat Samarinda yang berprofesi sebagai petani, tetapi hal itu bisa diantisipasi dengan Pemkot Samarinda sehingga warga Samarinda masih bisa menikmati makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi.

Kerangka Dasar Teori

Strategi

Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran (Firmansyah, 2008:259). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Craig dan Grant yang mengartikan pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and long-term goals) dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi memiliki kaitan yang sangat erat dengan manajemen dalam sebuah organisasi. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya konsep manajemen strategi. Menurut Fahmi (2015:2), manajemen strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau sustainable termasuk dari segi profit yang stabil. Berbeda dengan konsep manajemen strategi yang disampaikan oleh Fahmi, menurut Susanto (2014:2), manajemen strategis ialah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang serta metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah proses tindakan yang dilakukan dalam menentukan arah sebuah

organisasi dengan memperhitungkan berbagai sisi kemampuan dari organisasi tersebut dengan mempergunakan metode pemanfaatan sumber dan instrumen organisasi agar tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai, artinya ada proses perhitungan secara cermat kekuatan diri dengan tujuan disertai cara menerapkan formulasi strategi tersebut.

Secara etimologis implementasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya to implement. Dalam kamus Webster, “to implement” berarti: to provide the means for carrying out (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan to give practical effect (untuk menimbulkan efek atau dampak), (Sumaryadi, 2010:85). Pengertian kamus Webster mengenai implementasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan segala sesuatu agar menimbulkan efek atau dampak, jadi implementasi merupakan pelaksanaan yang memiliki dampak yang diinginkan dari adanya pelaksanaan tersebut.

Marse (dalam Sumaryadi, 2010:85) mengatakan bahwa implementasi sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Sumaryadi, 2010:85) menerangkan bahwa implementasi kebijakan merupakan: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi merupakan aktifitas yang tidak terlepas dari proses komunikasi dan koordinasi antar sub bagian sistem organisasi yang diarahkan berdasarkan visi dan strategi yang telah diperjelas, dari sini implementasi lebih kepada pelaksanaan terhadap visi dan strategi tersebut untuk menimbulkan dampak yang diinginkan, dampak tersebut ialah tercapainya target yang diinginkan oleh organisasi tersebut.

Pangan.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian pangan dalam Suharjo (1988:67) adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, penggantian jaringan dan mengatur proses-proses di dalam tubuh. Selain itu ada pula pengertian yang dimaksud pangan pokok, yaitu bahan pangan yang dimakan secara teratur oleh sekelompok penduduk dalam jumlah cukup besar, untuk menghasilkan sebagian besar sumber energi. Pangan dikonsumsi manusia untuk mendapatkan energi yang berupa tenaga untuk melakukan aktivitas hidup (antara lain bernapas, bekerja, membangun, dan

mengganti jaringan yang rusak). Pangan merupakan bahan bakar yang berfungsi sebagai sumber energi. Sementara menurut Badan POM pangan adalah makanan untuk dikonsumsi yang tidak hanya berupa beras, tapi juga sayur-mayur, buah-buahan, daging baik unggas maupun lembu, ikan, telur, juga air. Ketahanan pangan menurut UU No 7 tahun 1996 Tentang Pangan Pasal 1 ayat 17 adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutu, serta aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan Pangan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Purwanti (2010:14) parameter ketahanan pangan rumah tangga yang didasarkan pada definisi ketahanan pangan dari UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, mempunyai empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu :

- a. Kecukupan ketersediaan pangan.
- b. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga Diukur berdasarkan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari yaitu makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga.
- c. Aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari kepemilikan lahan (misalkan sawah atau ladang) serta cara rumah tangga memperoleh pangan.
- d. Kualitas atau keamanan pangan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan satu saling hubungan atau komparasi, sehingga tidak memerlukan hipotesis.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, tetapi juga masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan Kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

Tempat penelitian di Kota Samarinda. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di Kota Samarinda untuk lahan persawahan untuk tanaman pangan khususnya beras sangatlah sedikit dan hanya kota samarinda sendiri bukan menjadi daerah produsen. Waktu Penelitian disertai penulisan proposal ini dimulai dari bulan Februari hingga Desember 2019.

Adapun orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara sebagai berikut Sekretaris Dinas, Kabid Cadangan dan Distribusi Pangan, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Masyarakat Kota Samarinda, serta data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melakukan pembinaan dan pemantauan lembaga-lembaga distribusi pangan serta pengembangan jaringan distribusi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maskuri, SP, M.M selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mengatakan bahwa :

“pembinaan yang kita lakukan adalah melakukan pembinaan terhadap ikatan petani organik yang jumlahnya sekitar 15 kelompok yang tersebar luas di seluruh wilayah Samarinda, dengan harapan nantinya kualitas dari hasil yang di hasilkan dari petani organik lebih baik dan lebih sehat karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa melakukan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan serta pengembangan jaringan distribusi butuhnya kerja keras dari semua pihak, bukan hanya dari satu pihak saja tetapi pihak lainnya juga harus saling mendukung, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah memberikan pembinaan teknis cara bercocok tanam ramah lingkungan (organik), pembuatan pestisida nabati, pemberian label 1, 2, dan 3 mensosialisasikan produk pertanian organik (sehat) dan juga membantu pemasaran. Hal ini mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam pasal 50 bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan dan juga mengharuskan pemerintah daerah dalam melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk pangan lokal.

Meningkatkan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah daerah.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maskuri, SP, M.M selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mengatakan bahwa :

“untuk cadangan pangan sendiri alhamdulillah kita mempunyai 100 ton dari provinsi, 100 ton dari pemerintah pusat, dan 4 ton yang kita miliki yang dapat di sumbangkan ketika adanya bencana alam seperti banjir yang sering terjadi di Kota Samarindah ini”.

Dari hasil observasi selama berada di lapangan dapat diketahui bahwa dalam cadangan yang dikuasai oleh pemerintah yang dimaksud di sini adalah

bahan pokok yaitu beras dan sampai saat ini cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum sama sekali digunakan karena terkendala aturan yang mengharuskan ketika keadaan genting saja barulah cadangan pangan yang di kuasai oleh pemerintah dapat di gunakan dan Dinas ketahan Pangan bekerjasama dengan BULOG terkait penyimpanan stok beras tersebut.

Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan tidak dapat menyimpan cadangan beras daerahnya sendiri dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan tidak mempunyai lahan yang cukup untuk menyimpan cadangan pangan tersebut maka dari itu Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan BULOG dalam hal penyimpanan cadangan pangan tetapi ketika cadangan pangan tidak di gunakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maka Dinas Ketahanan Pangan akan di kenakan biaya sewa gudang sehingga untuk menghindari itu Dinas ketahanan pangan melakukan langkah-langkah terhadap beras yang tidak tersalurkan yang akan di distribusikan kepada masyarakat pra sejahtera yang tidak tersejangkau oleh pemerintah pusat atau yang tidak mendapatkan beras miskin (raskin) dengan adanya Perwali No 31 Tahun 2018 pasal 4 ayat c rawan pangan transein khususnya pada daerah terisolir dan/ dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronos karena kemiskinan. Dengan kata lain pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan bisa menggunakan cadangan pangan pemerintah daerah ketika dalam 1 (satu) tahun atau berjalannya pemerintahan tidak ada terjadiya bencana alam segingga cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat di distribusikan kepada masyarakat pra sejahtera yang tentunya membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah karena terjaminnya pangan untuk msyarakat adalah tanggung jawab dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Memaksimalkan penyelenggaraan, pengelolaan cadangan pangan daerah.

Pengelolaan yang dimaksud adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain agar mencapai target, dengan memaksimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan maka diharapkan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik dan benar agar tujuan dapat tercapai maka dibuatlah langkah-langkah atau strategi untuk mencapai target tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Moh Saleh, M.M selaku sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“selain bazar pangan murah kita juga membuat program sumbangan sembako dengan membagikan beras-beras yg kita miliki kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu dan rencana itu akan kita lakukan insyaallah pada tahun depan mengingat cadangan pangan tidak dapat di gunakan ketika tidak dalam situasi genting”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan strategi dengan memaksimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan daerah sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kota dengan cara mengeluarkan perwali tentang penyaluran beras kepada masyarakat-masyarakat kurang mampu

tetapi cadangan pangan yang akan disumbangkan kepada masyarakat kurang mampu hanyalah cadangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 4 ton saja dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan sendiri tidak bisa menjangkau cadangan beras yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga ada 200 ton yang tidak bisa disentuh oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda tetapi ketika ada musibah barulah cadangan pangan tersebut bisa dikeluarkan.

Mendorong OPD teknis di bidang pertanian, perkebunan dalam peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketersediaan pangan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengurusan ahli fungsi lahan pertanian melalui dewan ketahanan pangan

Dewan ketahanan pangan adalah Lembaga Nonstruktural yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas Dewan Ketahanan Pangan terbut meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs.Moh Saleh, M.M selaku sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“ketersediaan pangan di kota samarinda sendiri untuk saat ini mencukupi tetapi lebih mengarah ke kurang karena untuk bahan pangan segar banyak mengandalkan daerah luar samarinda jadi kalau di bisa di bilang ketersediaan pangan di kota samarinda cukup memadai tetapi kalau di lihat dari segi gizinya kurang memadai karena untuk masalah gizi ini kn tergantung dengan individunya masing-masing lagi kalau di samarindah ini lebih banyak makan proteinnya dari hewani dari pada yang nabati”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan dalam strategi Mendorong OPD teknis di bidang pertanian, perkebunan dalam meningkatkan produksi untuk mendukung ketersediaan pangan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan pengurusan alih fungsi lahan pertanian melalui dewan ketahanan pangan bahwa dinas ketahanan pangan melakukan koordinasi-koordinasi dengan OPD teknis terkait untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan seperti berkoordinasi dengan OPD pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya karena untuk ranah peningkatan produksi ada di Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan lebih berfokus kepada masyarakatnya. Dengan di bentuknya desa sejahtera mandiri diharapkan untuk desa-desa lebih mengembangkan lagi potensi yang ada di desa tersebut dengan bantuan yang diberikan oleh dinas ketahanan pangan Kota Samarinda.

Mendorong dalam penyediaan cadangan pangan pemerintahan daerah dan cadangan pangan masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan pangan bekerjasama dengan BULOG

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs.Moh Saleh, M.M selaku sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“untuk kerawanan pangan sendiri ketika ada seseorang yang dalam sehari itu tidak makan maka itu akan menjadi tanggung jawab kami jadi tugas kami memastikan untuk setiap orang yang ada di kota samarindah ini dapat makan dengan baik dan kita juga bekerjasama dengan bulog dalam hal penyediaan beras ini kita simpan cadangan pangan kita sama bulog”.

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Maskuri, SP, M.M selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Mengatakan Bahwa :

“di agen dan di distributor kita beras itu tidak pernah berhenti masuk sekian ton dan keluarnya juga sekian ton beras itu tidak pernah berhenti begitu juga dengan di bulog dan yang siap pakai itu sekitar 400 sampai 600 ton dan sekarang di bulog itu ada beras medium dan ada beras premium, beras premium itu yang di jual ke masyarakat umum seperti yang kita makan sehari-hari dan beras yang medium adalah beras yang untuk masyarakat miskin”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda dengan BULOG dalam hal ini bulog sebagai distributor untuk bahan pokok beras dan dalam penyajiannya bulog mempunyai dua kualitas beras yaitu premium dan medium dan untuk perawatannya sendiri bulog melakukan pembersihan kutu setiap bulannya agar beras yang kita nikmati terbebas dari kutu.

Faktor faktor Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Samarinda

Ada beberapa faktor yang mendukung Strategi Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut : Dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mendukung peningkatan kedaulatan pangan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi ketika dilakukannya Bazar Pangan Murah, Dana yang memadai dalam setiap kegiatan, Teknologi pertanian yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi komoditas pangan di Kota Samarinda.

ada beberapa faktor yang menghambat Strategi Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebagai berikut : Terbatasnya data pendukung (Validasi data) Ketahanan Pangan, Terbatasnya sarana prasarana, SDM teknis fungsional yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD dalam mewujudkan ketahanan pangan, Adanya aturan yang menghambat penggunaan cadangan pangan, Penyamaan persepsi semua stekholder tentang pentingnya pangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa :

- a. Dalam melakukan pembinaan dan pemantauan lembaga-lembaga distribusi pangan serta pengembangan jaringan distribusi dinas ketahanan pangan melakukan pemantauan dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan 2 (dua) bulan sekali dengan pada distributor pangan dan melakukan pertemuan dengan OPD teknis serta Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 4 (empat) bulan sekali dalam artian koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Dinas ketahanan Pangan dengan OPD teknis dan juga Dewan Ketahanan Pangan dalam setahun sebanyak 3 (tiga) kali serta melakukan pengembangan jaringan seluas-luasnya dengan daerah produsen seperti di daerah Sulawesi dan Jawa Timur serta dalam melakukan pembinaan dinas ketahanan pangan membutuhkan kerja keras dari semua belah pihak dan dinas ketahanan pangan juga memberikan bantuan-bantuan kepada petani organik agar masyarakat kota samarinda lebih memilih mengkonsumsi hasil tanaman organik di bandingkan non organik di karenakan hasil dari tanaman organik lebih sehat di bandingkan dari tanaman non organik karena tanaman non organik mengandung bahan kimia seperti pestisida. Dinas ketahanan pangan juga melakukan Bazar Pangan Murah yang dilakukan ketika menjelang hari-hari besar seperti idul fitri dan menjelang tahun baru yang dilakukan hampir di setiap kecamatan, kelurahan yang ada di kota Samarindah dengan fokus kecamatan-kecamatan terluar Samarindah.
- b. Dalam meningkatkan cadangan pangan yang di kuasai oleh pemerintah daerah dinas ketahanan pangan melakukan kerjasama dengan distributor-distributor besar seperti BULOG dalam hal cadangan pangan, dalam hal ini cadangan pangan yang dimaksud adalah bahan pokok yaitu beras dan hingga saat ini pasokan beras yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat mencukupi.
- c. Dalam memaksimalkan penyelenggaraan, pengelolaan cadangan pangan daerah dinas ketahanan pangan telah memaksimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan dengan cara mengeuarkan cadangan pangan untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi hanyalah cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah daerah saja dan ada syarat atau catatan untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu haruslah warga yang tidak mendapatkan jatah raskin (beras miskin) sehingga cadangan pangan yang ada tidak menjadi mubazir atau sia-sia.
- d. Dalam mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dibidang pertanian, perkebunan dalam meningkatkan produksi untuk mendukung ketersediaan pangan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan pengurusan alih fungsi lahan melalui dewan ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak OPD teknis untuk melakukan rapat koordinasi yang dilakukan dalam 4 (empat)

bulan sekali jadi dalam setahun melakukan rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali. Dinas ketahanan pangan juga melaksanakan program dalam bentuk desa sejahtera mandiri yang diharapkan kedepannya desa lebih mengembangkan lagi potensi yang ada di desanya masing-masing.

- e. Dalam mendorong penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat dalam mengantisipasi kerawanan panganeekerjasama dengan BULOG, dinas ketahanan pangan menjadikan bulog sebagai salah satu distributor untuk bahan pokok beras di karenakan dinas ketahanan pangan tidak mampu menyimpan cadangan pangannya sendiri maka dari itu dinas ketahanan pangan bekerja sama dengan BULOG dalam penyimpanan cadangan pangan.
- f. Faktor-faktor pendukung strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan kota Samarinda yaitu lengkapnya payung hukum atau dokumen-dokumen pendukung mengenai ketahanan pangan seperti Undang-Undang No 12 Tahun 2012 dan juga Peraturan Walikota No 31 Tahun 2018, partisipasi masyarakat yang besar terhadap bazar pangan murah, alokasi dana khusus untuk kegiatan-kegiatan pembinaan dan teknologi pertanian yang semakin baik.
- g. Faktor-faktor penghambat strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan cadangan pangan kota Samarinda yaitu terbatasnya data pendukung yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, kurangnya SDM teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah terkait data yang dimiliki oleh pusat dan daerah berbeda dan adanya aturan yang menghambat penggunaan cadangan pangan.

maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan lebih meningkatkan kembali pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya produk hasil tanaman organik dengan cara melakukan sosialisasi di tiap-tiap kecamatan ataupun kelurahan yang ada di kota samarinda.
- b. Dinas Ketahanan Pangan harus lebih melakukan pengawasan terhadap bongkar muat barang agar data yang di dapatkan lebih akurat dengan cara menambah jumlah aparatur teknis dalam pengawasan tersebut.
- c. Dinas Ketahanan Pangan harus melakukan perekrutan aparatur teknis yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan agar dapat memaksimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan.
- d. Dinas Ketahanan Pangan harus lebih memahami potensi dan sumber daya yang ada di daerah dan dilaporkan kepada pusat agar tidak terjadinya selisih paham pandangan antara pusat dengan daerah.
- e. Harus adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan tujuan agar lahan-lahan pertanian yang ada di Samarinda semakin tahunnya tidak berkurang. Dengan adanya aturan ini maka di harapkan lahan yang semula menjadi lahan pertanian tidak

beralih fungsinya tetapi dengan komitmen dengan para petaninya yang tidak akan menjual lahannya dan tetap mau bercocok tanam dengan jaminan hasil dari petani lokal harus ada jaminan pembelinya bisa pemerintah yang membeli atau pihak swasta.

- f. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan harus mempunyai 1 (satu) pandangan atau persepsi terkait pangan.
- g. Harus adanya penyamaan data-data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak ada data-data yang tidak benar atau salah data, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
- h. Dengan jumlah populasi 778.883 jiwa masyarakat kota Samarinda yang mempunyai tingkat konsumsi beras sebesar 58.883,55 ton per tahunnya petani lokal hanya mampu memproduksi 11.328,27 ton saja dengan artian pemenuhan kebutuhan beras masih kurang -47.555,28 ton dengan presentasi penyediaan sebesar 19,23% dengan presentase devisa -80,76%, dengan kota Samarinda yang bukan sebagai daerah produsen maka diharapkan untuk presentasi produksi harus meningkat setiap tahunnya. Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara maka diharapkan agar adanya zonasi terkait pangan tersebut karena kota Samarinda sendiri bukan daerah produsen sehingga Samarinda mengharapakan daerah lain untuk ketersediaan pangannya

Daftar Pustaka

- Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Strategi, Teori dan Aplikasi. Bandung : PT. Alfabeta.
- Purwanti, Pudji. (2010) Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil dalam Mencapai Ketahanan Pangan. Malang, Press UB.
- Suhardjo. 1988. Perencanaan Pangan dan Gizi. Bumi Aksara. Bogor.
- Susanto, AB. 2014. Manajemen Strategik Komprehensif Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Jakarta : Erlangga

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan